

STUDI TENTANG FUNGSI PENGAWASAN ATAS PENGUNGKAPAN CSR

Priscilla Ruth Putri¹ and Hisar Pangaribuan²
Adventist University of Indonesia

ABSTRACT. *This study aims to determine whether the supervisory function seen from the proportion of independent commissioners and independent audit committees has a significant influence on Corporate Social Responsibility (CSR). The samples used in this study were 53 samples of banks in Indonesia, Malaysia, and Singapore. The method used in this research is descriptive coefficient, coefficient of determination, correlation coefficient, F test, and T test. The results of this study indicate that the independent board of commissioners has no effect on CSR disclosure with t count $-0.038 < t$ table 1.65978 with is 0.05 or sig level. 0.704 is greater than 0.05 and the independent audit committee has no effect on CSR disclosure with t count $0.229 < t$ table 1.65978 with, 0.05 or sig level. 0.819 greater than 0.05*

Keywords: *Oversight Function; Proportion Audit Committee Independence; Audit Committee Independence; Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Semua perusahaan pada dasarnya berkeinginan untuk menghasilkan keuntungan dan laba setinggi-tingginya. Namun, kadang mereka tidak sadar bahwa kegiatan operasional yang mereka lakukan dapat mempengaruhi lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan dan kerugian. Tingginya kesadaran masyarakat akan lingkungan membuat perusahaan sadar dan berlomba untuk memberikan citra baik kepada masyarakat. Nilai perusahaan yang tinggi digunakan sebagai strategi kompetitif bagi yang memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan (Widyasari, dkk, 2015). Kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial harus dilandaskan dengan pemikiran bahwa selain memiliki kewajiban ekonomi dan *valid* terhadap pemegang saham (Wijaya, 2012). Oleh karena itu, perusahaan mulai sadar pentingnya memperhatikan lingkungan sekitar dan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semakin dibutuhkan untuk memiliki gelar asosiasi yang mengarah pada peningkatan minat di masyarakat. Minat ini tercermin dalam berbagai bidang, termasuk media, analisis pendidikan, politik, dan lingkungan bisnis. CSR mungkin merupakan definisi luas dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, penciptaan pengembangan properti, dan stabilisasi ekonomi, suasana, dan lingkungan sosial. CSR tidak lagi dinilai untuk mencapai tujuan

kesejahteraan dan tidak lagi dipromosikan oleh pemerintah. Namun, undang-undang tersebut didorong secara endogen oleh perusahaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan tujuan kelompok sosial saat ini, banyak pelanggan yang mendesak mereka untuk melakukan perubahan, mengklarifikasi banyak hal, dan berpartisipasi dalam masalah sosial, budaya dan lingkungan, bahkan ketika perusahaan sedang menjalankan bisnis. Pengungkapan CSR adalah bentuk dari komunikasi perusahaan dengan kelompok atau tokoh berkepentingan dan masyarakat umum secara keseluruhan (Mukti dan Kurni, 2015).

Program CSR adalah salah satu investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan untuk dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih untuk keuntungan (Rindawati, 2015). Menurut Gray ey al. (Sembiring, 2005) bahwa tumbuhnya peran sebuah perusahaan di masyarakat telah melahirkan kritik dan kekhawatiran karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk, serta hak dan status tenaga kerja, sehingga sebagian besar perusahaan yang terdaftar di BEI banyak yang sudah menerapkan CSR, karena mereka dituntut untuk bertanggung jawab dengan tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial tempat mereka berdiri.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat menjadi topik perdebatan ekonomi dan bisnis. Perkembangan tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diungkapkan dalam anggaran sebagai bukti bahwa usaha tersebut sebenarnya memiliki kegiatan CSR. Fitria dan Hartanti (2010) menegaskan bahwa deteksi CSR diterapkan di pasar modal dengan menggunakan indikator yang digunakan dalam praktik CSR. Contoh: Setiap bursa memiliki *Stock Market Ownership Index (DJSI)*, *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment Index (SRI)*, dan *Times Currency Exchange (FTSE)* memiliki *FTSE4Good*, *Hansen Exchange*, Singapura (Effendi, 2009).

Rencana utama CSR adalah membentuk perusahaan menjadi pola pikir *triple bottomline* yang mencakup keuangan, masyarakat dan lingkungan. Ide akhir tunggal harga perusahaan melalui rencana keuangan tidak relevan di era ini, karena hanya membatasi keuntungan tanpa mengkhawatirkan sisi lain (Putri, 2014). CSR ini diadopsi secara luas oleh beberapa perusahaan publik di Asia. Tren CSR global ini juga sedang diterapkan di industri bank.

Pengungkapan CSR sangat erat kaitannya dengan *good corporate governance (GCG)* yang diperhatikan oleh dunia usaha. Ide ini memiliki tujuan utama keseimbangan internal dan eksternal. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif. Fungsi pengawasan yang

terdiri dari proporsi dewan komisaris independen (PDKI) dan proporsi komite audit independen (PKAI).

Informasi tentang tanggung jawab perusahaan saat ini meskipun menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan, pada kenyataannya hal tersebut menjadi dasar bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, sehingga adopsi data ini akan berdampak besar bagi properti perusahaan. Pengungkapan CSR di Indonesia termasuk pengungkapan wajib karena telah ada regulasi yang mewajibkannya, salah satunya adalah peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berlaku sesuai dengan Kep. Ketua Bapepam dan LK no. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Secara tidak langsung, khususnya investor dan calon investor untuk bahan dasar keputusan investasi dan bagi karyawan untuk memperkirakan karakteristik nasib pekerjaan mereka dan pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggunakan Laporan Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagai referensi dasar untuk kepatuhan dan mengontrol jalannya aktivitas perusahaan untuk menciptakan skenario yang harmonis antara lingkungan perusahaan dan lingkungan sosial (Khadifa dan Chariri, 2014).

Penelitian ini dilakukan oleh beberapa studi sebelumnya. Penelitian Rivandi dan Putra (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Restu, Yuliandari, dan Nurbaiti (2017) menyatakan proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* sedangkan ukuran komite audit secara parsial berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Studi Tentang Fungsi Pengawasan atas Pengungkapan CSR”

LANDASAN TEORI

Dewan Komisaris Independen

Semakin banyak pemonitor akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi (Ratnasari dan Prastiwi, 2010; Pangaribuan, 2016).

Komite Audit

Komite audit adalah bagian integral dari peningkatan struktur dan praktik *Good Corporate Governance* (Arens, et al., 2012). Tanggung jawab komite audit untuk mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen (Rivandi & Gea, 2010). Sedangkan menurut Widyati (2013), komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut jasa keuangan no. 55, 2015, setiap tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh komisaris kepada komite audit, maka komite audit harus menjalankannya baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja sosial. Menurut Ratnasari (2011), semakin banyak anggota komite audit akan semakin baik untuk dapat meningkatkan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan terhadap inovasi dan berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* CSR merupakan fungsi dari etika bisnis global yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat secara keseluruhan, serta peningkatan taraf hidup karyawan dan keluarganya secara keseluruhan. Menurut ISO 26000 tentang pedoman tanggung jawab sosial, CSR adalah tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sosial dan lingkungan, sebagaimana ditetapkan dengan jelas dalam kerangka etika yang transparan dan konsisten dengan pengembangan kesejahteraan yang berkelanjutan, memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang ditetapkan dan integrasi dengan seluruh organisasi. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, karena rencana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya nyata perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan berdampak pada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kesejahteraannya di bidang sosial, ekonomi, dan sosial pendidikan dan lingkungan, seperti akses transportasi dan kesempatan kerja.

CSR adalah sebuah kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab untuk mencermati lingkungan sosial demi kemakmuran dan kepentingan bersama (Rivandi et al. 2017; Pangaribuan et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh *Global Reporting Initiative* (2008) menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan jumlah

entitas bisnis yang membuat laporan CSR, 300 entitas bisnis di tahun 1996 menjadi 3.100 entitas bisnis di tahun 2008. Menurut Elkington merumuskan 3 prinsip dasar yang melandasi CSR yaitu:

- a. Profit (laba), perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba yang besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnisnya.
- b. People (orang), perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar memperoleh legitimasi atas segala kegiatan bisnis yang dilakukan. Legitimasi diperlukan agar terwujud suatu perusahaan yang *sustainable and acceptable*.
- c. Planet, perusahaan merupakan bagian dari lingkungan dimana perusahaan itu berada. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas kepeduliannya dengan lingkungan adalah dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan hayati (Hadi, 2011).

Teori Legitimasi

Teori ini berkaitan dengan terciptanya kesesuaian sistem nilai suatu perusahaan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Menurut Hadi (2011), Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik. Legitimasi dapat diperoleh jika terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan dan Tobin, 2002). Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas.

Teori Stakeholder

Ghozali dan Chariri (2007), bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Tugas perusahaan yaitu memaksimalkan *profit* demi untuk para pemegang saham dan apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR diluar kepentingan *stakeholder*, maka hal itu akan menyalahi tujuan utama perusahaan (Friedman, 1967). Kepentingan-kepentingan *stakeholder* ini harus dipenuhi karena apabila diabaikan maka perusahaan akan kehilangan legitimasi dari *stakeholder*. Menurut Hadi (2011), perusahaan hendaknya menjaga reputasi dengan cara menggeser pola orientasi yang semula semata-mata diukur dengan *measurement* yang cenderung *shareholder orientation* kearah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial masyarakat.

Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa dan kepentingan mereka yaitu dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan, menggambarkan bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah dimana hubungan tersebut timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat untuk pemerintah yang menyediakan jasa untuk kepentingan masyarakat.

Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR

Hasil dari penelitian Ratnasari dan Prastiwi (2010) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap CSR. Menurut hasil dari Santioso dan Chandra (2012), bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Rivandi dan Putra (2019), proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Komisaris independen dapat menjadi komisaris yang bukan merupakan anggota pihak terkait atau tidak mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan oleh karenanya dewan komisaris dan orang lain selain perusahaan itu sendiri (Putri, 2013). Keberadaan komisaris independen diasumsikan netral terkait dengan semua kebijakan yang dikembangkan oleh direksi. Karena komisaris independen tidak dipengaruhi oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan data secara lebih luas kepada pihak yang berkepentingan (Ratnasari, 2011).

Muntoro (2006) mengatakan bahwa komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris dari kepentingan investor dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Jika jumlah komisaris independen meningkat, maka fleksibilitas dewan komisaris dalam membuat proposal agar tidak kehilangan netralitas dan mengutamakan perusahaan akan menjadi tantangan besar (Untoro, 2013). Beberapa analisis sebelumnya oleh Haniffa dan Cook (2002) telah menyebutkan bahwa proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan. Pada teori dan temuan yang disajikan, asumsi yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh pada Pengungkapan CSR

Proporsi Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan CSR

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016), mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Abidin dan Lestara (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Darmayanti (2014), komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Selain memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, komite audit juga dituntut untuk menjaga independensinya. Dimana komite audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang berbeda, sehingga hasil pengawasan yang dilakukan mendapatkan hasil yang obyektif dan oleh karena itu manajer menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki (Chrisdianto, 2013). Selain itu, komite audit independen juga diartikan sebagai individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, sehingga hasilnya akan kredibel (Cahyono, Andini, Raharjo, 2016). Raharjo dan Daljono (2014) menambahkan bahwa semakin besar proporsi komite audit independen dapat menawarkan pengawasan yang lebih tinggi sehingga akan menawarkan kepercayaan dan kualitas laporan.

Ditambahkan oleh (Marpaung & Latrini, 2014) semakin kecil proporsi komite audit yang independen, maka kewenangan yang dimiliki oleh unit area tersebut dibatasi dan mengurangi operasinya daripada pengawasan yang diadministrasikan. Komite audit sebaiknya berasal dari pihak luar, sehingga dapat dipercaya sebagai independen, karena anggota yang berasal dari pihak luar tidak akan memperlakukan kegiatan atau pengelolaan perusahaan. Selain itu, anggota komite audit independen harus memiliki keahlian sehingga dapat memperluas fungsi pengawasan secara efektif.

Sehingga diharapkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dapat membuat internal perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak internal dan eksternal. Pada teori dan temuan yang disajikan, asumsi yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

H2: Proporsi Komite Audit Independen berpengaruh pada Pengungkapan CSR

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam laporan tahunan sebuah perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ada dalam laporan tahunan perusahaan perbankan Indonesia, Singapura dan Malaysia periode 2018-2019. Subjek penelitian ini berasal dari total 53 perusahaan perbankan di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang didapat dari bursa efek masing-masing negara periode 2018-2019. Untuk mendapatkan laporan tahunan perusahaan maka penulis mengunduh laporan keuangan dari bursa efek bank masing-masing negara.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Negara	Jumlah Tahun Penelitian	Jumlah Sampel Penelitian
1	Indonesia	40	80
2	Singapura	3	6
3	Malaysia	10	20
Total		53	106

Metode untuk melakukan pengumpulan sampel adalah dengan menggunakan cara *purposive sampling*, dengan ciri-ciri bahwa perusahaan yang diobservasi adalah perusahaan perbankan yang terdapat di negara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang terdaftar di bursa efek masing-masing negara pada periode tahun 2018-2019 yang menyediakan laporan tahunan tiap periode secara lengkap tentang proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen dan juga tanggung jawab sosial perusahaan secara lengkap. Berdasarkan kriteria dan ciri yang tertera di atas, total sampel yang ada dalam penelitian ini berjumlah 106 (terdiri dari 53 perusahaan perbankan di Indonesia, Singapura dan Malaysia selama periode 2018-2019). Secara lengkap sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Terdapat tiga variabel yang diamati yaitu pengungkapan CSR, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi komite audit independen. Penelitian ini menggunakan 79 item CSR yang didapatkan dari laporan tahunan perbankan yang ada. Proporsi dewan komisaris dan proporsi komite audit independen di dapat dari laporan tahunan perbankan masing-masing. Proporsi dewan komisaris independen didapat dari anggota dewan komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris dan proporsi komite audit independen didapat dari anggota audit independen dibagi jumlah anggota audit seperti yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Pengungkapan Corporate Social Responsibility	$CSRDI = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{79 \text{ item}}$	Rasio
Proporsi Dewan Komisaris Independen	$PDKI = \frac{\text{anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$	Rasio
Proporsi Komite Audit Independen	$PKAI = \frac{\text{anggota audit independen}}{\text{jumlah anggota audit}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji deskriptif, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji F dan uji T untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR dan proporsi komite audit independen terhadap pengungkapan CSR.

Uji Deskriptif

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa nilai min. dewan komisaris independen adalah 0.43 dengan nilai maksimum 1.00 yang berarti bank-bank tersebut hanya memiliki 43% dewan komisaris yang independen dengan beranggotakan 100% anggota dewan komisaris yang independen. Nilai *mean* 0.6095 yang berarti rata-rata 60.95% anggota dewan adalah anggota dewan komisaris yang independen. Dengan dilihat dari hasil rata-rata dapat dikatakan bahwa telah terselenggaranya korporasi yang baik pada perusahaan perbankan di Indonesia, Singapore, dan Malaysia. Sedangkan nilai minimal komite audit independen adalah 0.50 dengan nilai maksimum 1.00 yang berarti bank-bank tersebut memiliki 50% komite audit yang independen dengan beranggotakan 100% komite audit independen. Dengan nilai *mean* 0.9660 yang artinya 96.60% anggota komite adalah komite audit independen. Diharapkan dengan semakin besarnya proporsi komite audit independen maka dalam pelaporannya akan dapat dipercaya (Antonia, 2008).

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	106	.43	1.00	.6095	.11892
X2	106	.50	1.00	.9660	.09742
Y	106	.08	.71	.3680	.11133
Valid N	106				

Sumber: olah data 2021

Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Diketahui nilai *r* dalam penelitian ini adalah sebesar -0.036 yang berarti hubungan antara dewan komisaris dan komite audit terhadap CSR perusahaan sangat lemah dan negatif. Tanda

negatif pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen tidak sejalan dengan CSR perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Singapore tahun 2018-2019.

Tabel 4. Correlations

		X	Y	Z
X	Pearson	1	.063	-
	Correlations			.036
	Sig. (2-tailed)		.521	.714
	N	106	106	106
Y	Pearson	.063	1	.020
	Correlation			
	Sig (2-tailed)	.521		.837
	N	106	106	106
Z	Pearson	-	.020	1
	Correlation	.036		
	Sig (2-tailed)	.714	.837	
	N	106	106	106

Sumber: olah data 2021

Koefisien Determinasi

Pada tabel 5 menunjukkan nilai *R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0.002 yang berarti bahwa pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen terhadap CSR adalah sebesar 0.2% dan 99.8% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.043 ^a	.002	-.018	.11231

Sumber: olah data 2021

Uji F

Hasil analisis regresi didapatkan signifikansi p-value = 0.911 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan.

Tabel 6. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum Squares	Of df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	2	.001	0.94	.91 ^a
	Residual	1.299	103	.013		
	Total	1.301	105			

a. Predictors: (Constant), X2,X1

b. Dependent Variable : Y

Sumber : Olah data 2021

Uji T

Dari uji T dapat dilihat bahwa proporsi dewan komisaris independen (X1) signifikan p-value = 0.704 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H₀ diterima atau proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa proporsi komite audit independen (X2) signifikan p-value 0.819 > 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H₀ diterima atau proporsi komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR perusahaan perbankan.

Tabel 7. Uji t
Coefficients^a

Model		Unst Coefficients		Std Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.364	.120		3.040	.003
	X1	-.035	.092	-.038	-.381	.704
	X2	.026	.113	.023	.229	.819

Dependent Variable : Y

Sumber : olah data 2021

Uji ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2009). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hipotesis tidak diterima karena t hitung -0.038 < t tabel 1.65978 dengan α adalah 0.05 atau level sig. 0.704 lebih besar dari 0.05. Berarti

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perbankan 2018-2019.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hipotesis tidak diterima karena t hitung $0.229 < t$ tabel 1.65978 dengan α , 0.05 atau level sig. 0.819 lebih besar dari 0.05 . Yang berarti tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara proporsi komite audit independen terhadap pengungkapan CSR perbankan 2018-2019.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR tergolong lemah negatif, dan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat secara signifikan dalam upaya pengungkapan CSR perusahaan perbankan. Hal tersebut dikarenakan proporsi dewan komisaris independen belum maksimal dalam mengungkapkan CSR perusahaan perbankan di 3 negara tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan proporsi komite audit independen terhadap CSR tidak berpengaruh, dan proporsi komite audit independen tidak dapat secara signifikan dalam upaya pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan proporsi komite audit independen belum dapat untuk mengungkapkan CSR perusahaan perbankan di 3 negara tersebut.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada sulitnya untuk perusahaan perbankan memfokuskan terhadap CSR perusahaannya dikarenakan dari laporan tahunan masih tergolong sedikit bank yang fokus terhadap CSR banknya sendiri. Keterbatasan lainnya penelitian ini hanya menggunakan 2 tahun penelitian dari 2018-2019. Sehingga waktu penelitian tergolong sangat sedikit.

Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang baik akan berdampak pada lingkungan disekitarnya, maka disarankan kepada bank yang ada agar dapat meningkatkan pelaksanaan CSRnya masing-masing untuk menjaga lingkungan sekitar juga. Jika peneliti lain juga ingin melakukan penelitian yang serupa disarankan untuk menggunakan perusahaan pertambangan atau manufaktur yang lebih memfokuskan kepada CSRnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, Deni., Rindu Rika Gamayuni., dan Yenni Agustina. 2018. Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.23 No.2.

- Amalia, Firda Ayu. 2019. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Pengindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* Vol.4 No.2.
- Astuti, Susi. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* Vol.16 No.1.
- Candradewi, Intan., dan Ida Bagus Panji Sedana. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris m Terhadap *Return On Asset*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5 No.5.
- Hapsoro, Dody. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 23 No.3.
- Hidayati, Nurul., dan Fidiana. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 6 No.3.
- Krisna, Aditya Dharmawan., dan Novrys Suhardianto. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 18 No.2.
- Lamia, Fathia Vivie., Zirman., dan Yueita Anisma. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Porsi Kepemilikan Saham Publik dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan *Food & Beverages* Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *JOM Fekon* Vol. 1 No.2.
- Nurkin, Ahmad. 2010. *Corporate Governance* dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol.2 No.1
- Nussy, Trudy Maryona. 2013. *Corporate Governance* dan Entnisitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 17 No.1.
- Pangaribuan, H., Sihombing, J., Popoola, O. M. J., & Sinaga, A. M. N. (2019). An Examination of Voluntary Disclosure, Independent Board, Independent Audit

Committee and Institutional Ownership. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 52–67. <https://doi.org/10.52962/ipjaf.2019.3.2.68>

- Pangaribuan, H. (2016). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas Audit serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Disertasi doktoral. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Putra, Andi Harita., dan Muhammad Riyandi. 2019. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Perusahaan *High Profile* di Bursa Efek Indonesia). *Academic Conference of Accounting J Vol. 1*.
- Rahmawati, Inge Andhitya., Brady Rikumahu., dan Vaya Juliana Dillak. 2017. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol.2 no.2*.
- Rindawati, Meita Wahyu. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No.6*.
- Rivandi, Muhammad., dan Andi Harita Putra. 2019. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Perusahaan *High Profile* di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 8*.
- Siregar, Ivana., Lindrianasari., dan Komaruddin. 2013. Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4 No.1*.
- Widyasari, Nita Ayu., Suhadak., dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 26 No.1*.